

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karenanya kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang dikemukakan diatas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik ditinjau dan segi medis maupun agama.<sup>1</sup>

Dari segi orangnya, ada pasangan suami istri yang dilihat secara rasional dan matematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak dianggap telah siap untuk menerima kelahiran seorang anak. Tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu – tunggu belum juga datang.

Sebaliknya, disisi lain ada pula pasangan suami isteri yang merasa

---

<sup>1</sup> M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. PT Melton Putra, Jakarta 1991. hlm 12

masih belum siap untuk memperoleh keturunan dengan faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas, namun tidak dapat menghindar bila pada akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibat bahwa kehadiran seorang anak yang seharusnya ditunggu-tunggu dan didambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah dapat membawa kesulitan dan beban rumah tangga.<sup>2</sup>

Bila kedua masalah tersebut dikaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dengan upaya pengasuhan anak. Salah satu caranya adalah dengan cara melakukan adopsi, yaitu orang tua merelakan penyerahan anaknya untuk diasuh oleh pasangan yang belum memperoleh keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Seperti diketahui bahwa hukum waris termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata. tapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris barat misalnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari

---

<sup>2</sup> Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 2001. hlm 45

harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan.

Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.<sup>3</sup>

Jika hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di, negara barat, maka dampak yang timbul dari peristiwa itu tidak sederhana seperti yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap munculnya sederet akibat hukum baru.

Berdasarkan ketentuan di atas, anak angkat tidak termasuk salah seorang ahli waris dari orang tua angkat, sebab bukan kerabat hakiki, bukan pula terikat dalam persemendaan dan juga bukan budak yang dimerdekakan.

Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan ".

Dalam melakukan pengangkatan anak, ada beberapa ketentuan yang

---

<sup>3</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal hukum Perdata BW*, CV Rajawali Jakarta 1989, hlm. 52

harus dipenuhi antara lain tersebut di dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan atas adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga disebutkan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Orang tua angkat juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak, baik secara psikologis dan psikososial.

Pada masa penjajahan Belanda dulu, warga negara dibagi atas beberapa golongan, dan masing-masing golongan mempunyai aliran hukumnya sendiri. Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata atau yang disingkat KUHPerdata tidak berlaku untuk semua golongan penduduk. Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata tersebut hanya berlaku untuk:

1. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
2. Golongan orang-orang timur Asing Tionghoa, dan ;
3. Golongan orang-orang timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang menundukkan diri.

Secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat dijumpai praktek keluarga yang mengangkat anak / mengasuh anak tanpa dilengkapi dokumen yang memberikan kepastian hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa pengangkatan anak / pengasuhan anak yang seperti itu sebagai sesuatu yang telah dianggap benar karena selama ini tidak pernah menimbulkan persoalan, tanpa pernah disadari masyarakat bahwa hukum telah mengalami perkembangan dan perubahan.<sup>4</sup>

Dalam pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara), serta disahkan secara hukum secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut diatas maka pengertian anak angkat itu dapat disimpulkan adalah anak orang lain yang diangkat untuk dijadikan sebagai anak sendiri dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dengan tidak mengganggu status nasabnya.

Meskipun pengangkatan anak tidak merubah struktur nasab dan kewarisan, akan tetapi tidaklah sepenuhnya mengurangi nilai dari pengangkatan anak tersebut. Hal ini terutama terlihat pada :

---

<sup>4</sup> M. Ali As Shabuni, *Al Mawarits Fiis syarifatil Islamiyah*, Cetakan ke-2, Iqamatud Dini, 1986 hlm. 56

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 7.

1. Pengangkatan anak menciptakan hukum adanya peralihan pemeliharaan hidup sehari - hari yang pada mulanya dibawah kekuasaan orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.
2. Tanggung jawab biaya pendidikan yang pada mulanya harus ditanggung oleh orang tua kandungnya berpindah kepada orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak tidak memadai bila hanya dengan persetujuan kedua belah pihak saja, meskipun telah diresmikan melalui upacara adat dan agama, tetapi harus diperoleh lewat ketetapan Pengadilan. Dengan demikian status anak akan menjadi sah.
4. Adanya status anak angkat yang sah seperti yang dikemukakan diatas akan menciptakan akibat hukum dalam kewarisan, dimana si anak akan memperoleh wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta orang tua angkat. Demikian juga halnya dengan sebaliknya, yaitu bila si anak meninggal dunia maka si ayah angkat juga akan dapat memperoleh wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta si anak angkat.<sup>6</sup>
5. Arti dan pengertian wasiat. Perkataan wasiat itu berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata was-sha. Artinya menurut ilmu bahasa ialah pesan, petaruh, nasehat, dsb. Adapun pengartiannya menurut istilah Syariah ialah: pesan terakhir yang diucapkan dengan lisan atau disampaikan dengan tulisan oleh seseorang yang akan wafat berkenaan dengan harta benda yang ditinggalkannya. Berdasarkan pengertian umum dari ayat Al-Quran seorang muslim yang sudah merasa ada firasat akan meninggal dunia,

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, 2001, *Al Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan peradilan agama, jurnal dua bulanan mimbar hukum*, No, 54thun ajaran XII, Jakarta, hlm. 9.

diwajibkan membuat wasiat berupa pemberian (hibah) dari hartanya untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya, apa bila ia meninggalkan harta yang banyak

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan diantara mereka.

Jadi menurut Hukum, anak angkat terhadap orang tua angkatnya tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat /hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul:  
**"Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata"**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris ditinjau dalam hukum Perdata ?
2. Bagaimana pembagian hak waris anak angkat yang didasarkan atas wasiat

dari orang tua angkat ditinjau dari hukum Perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan Tujuan Penelitian serta Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat sebagai ahli waris ditinjau dalam hukum Perdata
2. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat bagi anak angkat dalam pembagian waris ditinjau dalam hukum Perdata

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum waris ditinjau dari hukum Perdata. Dan diharapkan pula nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian lainnya.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya para orang tua angkat dan para anak angkat ditinjau dari hukum Perdata. Mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing, terutama menyangkut harta peninggalan.



### 3. Kegunaan Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengetahuan khususnya penulis sebagai bahan penelitian selanjutnya pada permasalahan yang sama.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang ditinjau dari aspek-aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang akan diteliti ini sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif, yang artinya adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini menjelaskan secara sistematis tentang pembagian warisan anak angkat berdasarkan wasiat

### 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer, yakni

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari :

1) Dasar hukum pengangkatan anak :

- Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 39, 40 dan pasal 41. Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002
- Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1983 jo

2) Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 1989 Dasar hukum waris

- KUH Perdata Pasal 163 IS Yo. Pasal 131 IS.
- Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 & Keppers No. 240 /

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek

c. Bahan Hukum Tersier, yakni

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

### 3. Analisis Data

Analisis data berupa

- d. Deskripsi yaitu uraian norma-norma dan sejarah yang berkaitan dengan masalah.
- e. Analisis yaitu menggambarkan keterkaitan atau korelasi antara berbagai macam norma dengan peristiwa sejarah sehingga diperoleh penjelasan mengenai latar belakang, perkembangan, dan pola.

Sebelum data itu dianalisis terlebih dahulu dilakukan

- a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai ketetapan jawaban yang diterima dan relevansinya.
- b. Evaluasi yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya, konsistennya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis dan konsisten.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal 64

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

### **BAB I     PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Warisan dan Wasiat Menurut Hukum Perdata
- B. Pengertian Anak Angkat
- C. Hubungan Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat
- D. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat  
(dalam Muwaris)
- E. Dasar Hukum adanya Wasiat Terhadap Anak Angkat dari  
Orang Tua Angkat
- F. Syarat dan unsur Kewarisan

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata
- B. Pelaksanaan Wasiat Bagi Anak Angkat Dalam Pembagian Warisa Ditinjau Dalam Hukum Perdata

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Pittlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bld*,  
terjemahan M.Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta, 1982.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,  
Jakarta, 1989, hlm 29
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997,  
hlm.27
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,  
1995
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cetakan Ke-2, 1981
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra  
Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta,  
1991
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 1999
- Muchtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan  
nasional*, Bina Cipta, Bandung,, 1975, hlm.12
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  
Semarang, 2008.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 84-85
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm.23
- , *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm.537
- , *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.28
- Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Verlink van Hoeve, s Gravenhage, hlm.8

**Peraturan Perundang – Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- Staatblad 1917 Nomor 129
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak